

Kekerasan Politik

Bukan cuma negara yang punya presiden, bendera, atau pahlawan. Perusahaan komersial juga bisa punya presiden. Bahkan, klub sepak bola pun punya bendera dan pahlawan. Tapi, berbeda dengan semua lembaga sosial lain, hanya negaralah yang mencetak uang, mendirikan penjara, dan memajaki orang. Namun, semua itu masih belum merumuskan ciri terpenting dari lembaga yang dinamakan negara.

Sebuah definisi klasik tentang negara sudah diakrabi ilmuwan sosial sejak kuliah tahun pertama. Menurut Weber, negara adalah lembaga sosial yang memiliki hak monopoli untuk menggunakan senjata dan melakukan tindak kekerasan (termasuk membunuh) secara absah, di dalam wilayah kedaulatannya. Itulah yang membedakan negara dari komunitas agama atau dari gerombolan preman bersenjata. Definisi Weber terbukti jauh lebih mudah disetujui dan dihafal ketimbang diikuti implikasinya secara tuntas. Dalam analisa berbagai peristiwa kekerasan di mancanegara, gagasan cemerlang dari Weber sepertinya dilupakan. Juga di Indonesia.

Di balik sejumlah analisa menonjol tentang kerusuhan sosial di tanah air, ada satu kesamaan asumsi yang layak ditinjau kembali. Semuanya menuduh penduduk lokal yang jelata sebagai pelaku utama kerusuhan. Perdebatan yang berkembang selama ini hampir-hampir sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan keterlibatan lembaga aparat negara sebagai tersangka. Seakan negara berada di luar jangkauan hukum.

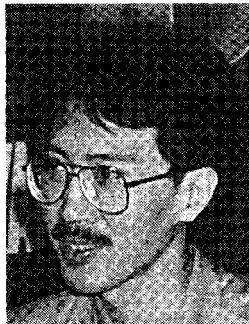
Dalam perdebatan tentang motivasi kekerasan belakangan ini, sebuah teori bisa saling berbeda hanya karena mereka mempersoalkan sisi-sisi lain dari identitas sosial warga lokal. Ada yang mempersoalkan apa agama, etnisitas, nilai budaya, atau kondisi ekonomi penduduk lokal. Dari situ berkembang-biaklah berbagai renungan, nasihat, keprihatinan, atau imbauan tentang kerukunan agama. Ada yang mengutak-atik sejarah ketegangan antaretnik dan budaya.

Kubu lain dalam perdebatan itu menolak relevansi agama dan suku. Mereka menunjuk kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai penyebab utama kekerasan. Para penganut teori sosial-ekonomi itu memberikan data dan uraian yang bersimpati kepada penduduk lokal yang jelata. Tetapi, dengan memberikan pembelaan semacam itu, betapapun tulusnya, para penganut teori itu telah ikut mengukuhkan tuduhan terhadap kaum jelata lokal sebagai pelaku utama sejumlah kerusuhan.

Hal yang sama dilakukan para analis yang menuding tersumbatnya saluran politik formal sebagai penyebab. Seakan berbagai kekerasan sosial belakangan ini merupakan letusan frustrasi emosional dari masa jelata, yang rasa keadilannya dilukai bertubi-tubi. Kekerasan dibela dan diabsahkan, tetapi tetap dengan menerima dan mengukuhkan tuduhan umum terhadap penduduk jelata lokal sebagai tersangka pelaku kekerasan itu.

Uraian ini tidak berambisi mengajukan sebuah tuduhan utuh terhadap satu atau beberapa elite politik sebagai pelaku dan penanggung jawab utama kekerasan belakangan ini. Ini hanya sekilas catatan untuk menunjukkan apa yang terhilang dari analisa sosial yang telanjur menonjol dalam masyarakat.

Uraian ini hanya mengangkat kembali perbincangan teoretik tentang "kekerasan negara" (*state violence*) yang mengacu pada realitas sosial secara global. Biar pun relevansinya terbatas bagi kasus-kasus khusus, uraian semacam ini dapat memperluas wilayah perdebatan di tanah air sendiri.



Ariel Heryanto
Antropolog Sosial

Sampai sekarang, kerangka analisa kekerasan negara masih asing dalam forum kajian ilmu sosial. Juga di Indonesia. Seretnya pertumbuhan kerangka teori ini mudah dipahami. Di satu pihak, aparat negara tidak akan senang mensponsori penelitian atau pertumbuhan teori semacam itu. Mereka lebih suka mengipas-ngipasi perdebatan yang lebih memojokkan warga swasta. Maka, suburlah istilah seperti "konflik SARA", kerusuhan "massal", kebrutalan "massa", atau "kecemburuan sosial", untuk menjuluki peristiwa.

Langkanya kerangka teori tentang kekerasan negara tidak sepenuhnya disebabkan oleh kejamnya sensor. Dalam kebutuhan yang sudah memasyarakat tentang aspek kekerasan negara, seakan-akan tidak masuk akal bila

aparatur negara menjadi sponsor atau pelaku kerusuhan, kekerasan, atau kebrutalan. Padahal, definisi Weber justru menyarankan bahwa negaralah yang paling berpeluang, jika perlu dan mau, melakukan tindak kekerasan dengan bebasnya.

Tetapi, kita telanjur terbiasa berpikir bahwa negara punya aparat hukum dan keamanan yang dibentuk justru untuk memadamkan kekacauan dan "mengamankan" masyarakat. Kita terbiasa mengenali negara sebagai sosok yang paling bermusuhan dengan pencuri, perampok, pemberontak, dan gerombolan pengacau keamanan (GPK). Seakan negara adalah pihak yang dirugikan bila dalam masyarakat terjadi keresahan dan kerusuhan.

Cara berpikir seperti itu melatih kita untuk percaya pada negara-negara superkuat dunia, yang menuding kelompok nonnegara superkuat sebagai kaum "fundamentalis" atau "ekstremis" atau "jaringan terorisme internasional". Seakan penudingnya hanya bisa menjadi korban terorisme dan tak mungkin menjadi bandar utama terorisme.

Kajian mutakhir di lingkungan ilmuwan sosial membongkar berbagai mitos itu. Mereka tidak sepenuhnya membuat penemuan baru. Mereka membaca ulang gagasan cemerlang seperti yang pernah diwariskan Weber dan mengawasi gejala mutakhir dengan wawasan yang lebih segar.

Sekarang, yang aneh justru mengapa tidak dulu-dulu kita mempertimbangkan faktor negara dalam memahami berbagai tindakan kekerasan di masyarakat. Kita semakin disadarkan bahwa "stabilitas keamanan" dan kekerasan tidaklah selalu bertentangan. Kekacauan tidak selalu menjadi buah dari kekerasan. Sejarah dunia membuktikan betapa banyak rezim yang berhasil menciptakan stabilitas keamanan lewat kekerasan, bahkan pembantaian massal.

Dalam karya klasiknya tentang sejarah berdirinya bangsa di dunia, ilmuwan Prancis Ernest Renan menyimpulkan, "Tindak kekerasan selalu menjadi benih terciptanya sebetuk kesatuan politik. Kesatuan senantiasa dibina dengan cara yang brutal." Sejarah kolonial Hindia Belanda yang penuh kekerasan telah menciptakan teritori Indonesia. Pertumpahan darah tahun 1965-1966 memberikan landasan berdirinya Orde Baru. Apa pun yang akan terjadi di Timor Timur tidak terlepas dari sejarah kekerasan yang berkepanjangan.

Begitu juga hubungan paradoks antara petugas keamanan negara dan maling, koruptor, teroris, preman, pelacuran, atau pengedar narkoba. Tidak selalu mereka bermusuhan. Bahkan lebih sering mereka saling bergantung dan saling membutuhkan. Mereka sering membina kerja sama sambil membagi tugas yang berbeda. Itu sama sekali bukan fenomena baru. Tidak juga terbatas di satu atau dua negeri. □